

TINJAUAN TERHADAP PENANGANAN PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU OLEH PENGADILAN NIAGA

INTISARI

Oleh:

Tasya Indriana Samosir¹ dan Irna Nurhayati²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Pengadilan Niaga dalam menangani pengajuan terhadap keberatan putusan KPPU semenjak adanya perubahan yang terdapat dalam UU No. 11/2020, yang pada awalnya Pengadilan Negeri yang berwenang dalam menangani keberatan terhadap putusan KPPU tersebut. Selain itu, peneliti ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan dan keefektifan Pengadilan Niaga dalam menangani pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian menggunakan metode atau cara penelitian hukum dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder secara berlaka seperti melihat undang-undang yang ada, literatur-literatur dan pendekatan kasus atas keberatan putusan KPPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

Terdapat perbedaan Pengadilan Niaga dalam menangani keberatan terhadap putusan KPPU dibandingkan dengan Pengadilan Negeri. Proses penyelesaian di Pengadilan Niaga diberikan waktu 3 (tiga) hingga 12 (dua belas) bulan untuk memberikan kepastian dalam proses pembuktian, agar lebih memberikan ketepatan dalam putusan. Dapat dikatakan adanya ketepatan dan keefektifan Pengadilan Niaga dikarenakan kasus persaingan usaha juga membahas ilmu ekonomi yang mana Pengadilan Niaga beserta Majelis Hakimnya telah memiliki pengalaman, kompeten dan sertifikasi dalam menangani kasus persaingan usaha.

Kata Kunci : Keberatan atas Putusan KPPU, Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri

¹ Mahasiswa Program S-2 Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta.

² Dosen Pembimbing Program S-2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

REVIEW OF HANDLING OF OBJECTIONS TO KPPU'S DECISION BY COMMERCIAL COURT

ABSTRACT

By:

Tasya Indriana Samosir¹ and Irna Nurhayati²

This study aims to determine the procedure of the Commercial Court in handling the submission of objections to the KPPU's decision since the changes contained in Law no. 11/2020, which was originally the District Court which was authorized to handle objections to the KPPU's decision. In addition, this study aims to determine the accuracy and effectiveness of the Commercial Court in handling the submission of objections to the KPPU's decision.

This research uses normative juridical method with analytical descriptive nature. The research uses legal research methods or methods by examining library materials or secondary data periodically, such as looking at existing laws, literatures and case approaches on objections to the KPPU's decision submitted to the Commercial Court.

There are differences between the Commercial Court in handling objections to the KPPU's decision compared to the District Court. The settlement process in the Commercial Court is given 3 (three) to 12 (twelve) months to provide certainty in the evidentiary process, in order to provide greater accuracy in the decision. It can be said that there is accuracy and effectiveness of the Commercial Court because business competition cases also discuss economics where the Commercial Court and its Panel of Judges have experience, competence and certification in handling business competition cases.

Keywords: *Objection to KPPU's Decision, Commercial Court, District Court*

¹ Master of Law Student, Law Faculty, Gadjah Mada University

² Master of Law Lecture, Law Faculty, Gadjah Mada University

